



**DINAS TENAGA KERJA
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**



Jl. Tumenggung Joganegoro
No.83, Tosari, Jaraksari, Kec. Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah



<https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/>



disnaker.wonosobo@gmail.com



(0286) 321338



@disnaker_wsb



PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good government and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja secara mandiri (*self assessment*) capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2020 adalah 72,14% dalam kategori baik. Hasil tersebut perlu menjadi evaluasi dan motivasi untuk terus meningkatkan capaian kinerja satu tahun ke depan.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam upaya berkontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan lebih berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat.

Wonosobo, Februari 2021

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO



EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi selama satu tahun anggaran. Laporan kinerja disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi atas target kinerja yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020.

Melalui pengukuran secara mandiri atas target kinerja yang telah ditetapkan diperoleh hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mencapai 72.14%. Pengukuran dilakukan terhadap sejumlah sasaran strategis berikut:

1. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional;
2. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah;
3. Meningkatnya produktivitas sector industri;
4. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja;
5. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; dan
6. Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan.

Dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 72,14% ini capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2020 masuk dalam kategori baik. Capaian kinerja tertinggi 100% ada pada sasaran strategis meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional, meningkatnya produktivitas sektor industri, berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja dengan indikator kinerja tingkat kesempatan kerja (TKK), terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Sementara itu capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah sebesar -149,48%, berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja dengan indikator kinerja

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 94,26%, dan meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan dengan indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar 88,42%.

Sampai dengan akhir Tahun 2020, dari anggaran sebesar Rp6.451.845.977,00 terserap sebesar Rp 5.981.147.808,00 atau sebesar 92,70%. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp2.063.171.362,00 terserap Rp2.037.061.704,00 atau sebesar 98,74%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Gambaran Umum.....	4
C.1 Kelembagaan.....	4
C.2 Sumber Daya Keuangan.....	6
D. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	19
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	22
1. Sasaran Strategis 1.....	22
2. Sasaran Strategis 2.....	25
3. Sasaran Strategis 3.....	28
4. Sasaran Strategis 4.....	29
5. Sasaran Strategis 5.....	33
6. Sasaran Stragetis 6.....	37
C. Akuntabilitas Keuangan.....	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Rekomendasi.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia.....	6
Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Disnakerintrans 2020	18
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal.....	20
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Disnakerintrans 2020.....	21
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.....	23
Tabel 3.4	Jumlah Peserta Pelatihan tahun 2020.....	25
Tabel 3.5	Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri Tahun 2019-2020.....	28
Tabel 3.6	Perhitungan Indikator Sasaran Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja.....	30
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kegiatan Pengembangan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.....	32
Tabel 3.8	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020.....	33
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill.....	33
Tabel 3.10	Formulasi Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.....	34
Tabel 3.11	Perhitungan Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.....	34
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial.....	35
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kegiatan Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten.....	37
Tabel 3.14	Program dan Realisasi Anggaran Disnakerintrans tahun 2020.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional kita, membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya, menegaskan bahwa manusia Indonesia adalah inti pembangunan, karena manusia inilah yang merencanakan, melaksanakan, dan merasakan hasil pembangunan. Maka menempatkan pembangunan sumberdaya manusia tidak hanya meliputi pembangunan fisik semata, tapi juga membangun skill dan karakternya.

Indonesia memiliki sumberdaya manusia yang sangat besar, bahkan merupakan negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Struktur umur penduduk Indonesia, sampai dengan tahun 2035, akan didominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun), inilah yang disebut sebagai bonus demografi atau *Windows of Opportunity*. Namun demikian, semua itu baru potensi yang untuk menjadi aktual harus dilakukan upaya menyeluruh, konseptual, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dan optimalisasi pendaayagunaannya dalam lapangan kerja yang produktif.

Kualitas sumberdaya manusia kerap kali diidentikkan dengan tingkat pendidikan formal. Hal ini tidaklah salah karena pendidikan formal bersifat tahun jamak (*multi years*) dan terstruktur, sehingga banyak peluang untuk menanamkan, membentuk, dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia, baik yang bersifat afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Namun demikian, pendidikan formal bukanlah satu satunya jalur pengembangan kualitas SDM. Jalur lain yang tidak kalah pentingnya adalah jalur pelatihan dan pengalaman kerja, baik yang terstruktur maupun otodidak. Dalam dunia kerja, jalur pelatihan dan pengalaman kerja ini justru yang sangat menentukan kompetensi dan produktivitas kerja seseorang.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk dapat menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Kuncinya ada pada kualitas sumberdaya manusia dan pendaayagunaannya secara produktif. Dari sudut pandang ketenagakerjaan, hal tersebut menyangkut dua masalah pokok, yaitu:

1. Penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent work*); dan
2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Wonosobo memiliki potensi sumberdaya manusia yang besar. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020 berdasarkan data Pusat Data Informasi (PUSDATIN) Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebanyak 405.187 orang, dari jumlah tersebut angkatan kerja sebanyak 428.178 orang. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo sebesar 71.26 persen. Dari angkatan kerja sebanyak 428.178 orang tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 405.187 orang, dan jumlah penganggur terbuka sebanyak 22.991 orang, yang berarti tingkat pengangguran terbuka sebesar 5.37 persen atau Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 94.63 persen.

Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang dinamis. Masalah yang selalu akan menjadi bahasan menarik, terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui kemampuan pembangunan tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, semakin besar kemampuan pembangunan dalam menciptakan kesempatan kerja semakin tinggi nilai keberhasilan dari pembangunan tersebut.

Maka pembangunan ketenagakerjaan semestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan memberi kontribusi penting bagi pencapaian visi pembangunan Kabupaten Wonosobo kurun waktu 2016 - 2021. Selaras dengan visi misi pembangunan Kabupaten Wonosobo, pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo, setidaknya diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi ketiga yaitu “meningkatkan kemandirian daerah yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari”, dengan sasaran yang hendak dicapai berupa meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, melalui strategi : Peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan

kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Di samping itu, pembangunan ketenagakerjaan juga diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian misi ke-4 yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pembangunan ketenagakerjaan diharapkan mengarahkan sasarannya pada upaya berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja, dengan strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja, dengan strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan akses ketrampilan dan meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai upaya perbaikan berkelanjutan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi ini dapat

memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kualitas kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

C. Gambaran Umum

1. Kelembagaan

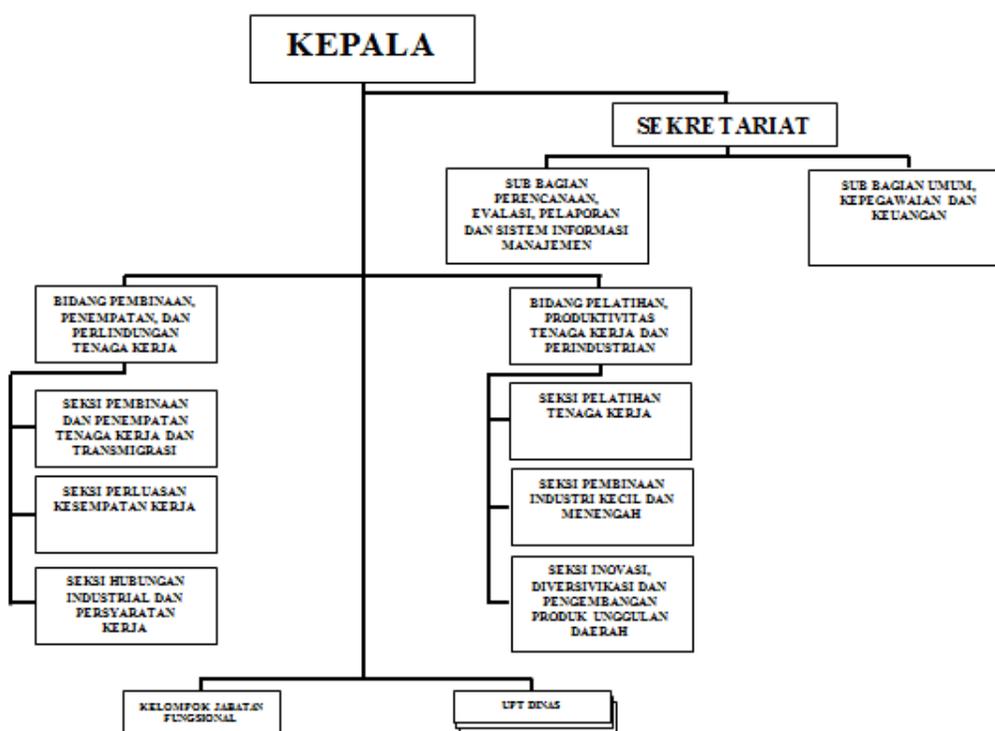
1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- e. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
- f. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- g. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
- i. Seksi Hubungan Perindustrian dan Persyaratan Kerja;
- j. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- k. Seksi Inovasi, Diversifikasi, Pengembangan Produk Industri Unggulan Daerah;
- l. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah;
- m. Jabatan Fungsional;
- n. UPT Balai Latihan Kerja

Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Wonosobo. Adapun tugas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Perindustrian dan Bidang Ketransmigrasian. Sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah perumusan kebijakan teknis Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Perindustrian dan Bidang Ketransmigrasian; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Perindustrian dan Bidang Ketransmigrasian; pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Perindustrian dan Bidang Ketransmigrasian.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

1.2 Sumber Daya

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi secara optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana

dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, sistem prosedur, dan mekanisme kerja.

1.2.1. Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	1
2	II	5
3	III	27
4	IV	5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kab. Wonosobo, Tahun 2019

b. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SLTP	2
3	SLTA	9
4	D2	2
5	D3	1
6	S1	21
7	S2	3

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kab. Wonosobo, Tahun 2020

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	7
2	Laki Laki	31

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab.
Wonosobo Tahun 2019

2. Sumber Daya Keuangan

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi pada Tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran melalui APBD Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar

Rp6.451.845.977,00 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp4.388.674.615,00 sedangkan belanja langsung hanya sebesar Rp2.063.171.362,00 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran belanja langsung dialokasikan dalam beberapa program/ kegiatan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi;
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

D. Sistematika Laporan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020 ini diuraikan tentang Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, serta analisis terhadap kinerja dan rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Muatan dokumen LKJiP ini tergambar dalam Sistematika Laporan, yang tersusun sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II - Perencanaan Kinerja, Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja, Menguraikan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

BAB IV - Penutup, Menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Beberapa isu strategis dalam pembangunan ketenagakerjaan meliputi tingkat penganggur terbuka, disamping tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, persentase pencari kerja yang ditempatkan, tingkat kesejahteraan pekerja, dan hubungan pengusaha - pekerja.

Pada Tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo sebesar 5.37 persen, atau sebanyak 22.991 orang tercatat sebagai penganggur terbuka. Angka ini di bawah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48 persen. Capaian tingkat pengangguran terbuka Tahun 2020 tercatat terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka dibanding tahun sebelumnya (2019) yang mencapai angka 3,47 persen (mengalami peningkatan sebesar 1,90 persen). Angka ini juga menunjukkan tingkat kesempatan kerja sebesar 94,63 persen lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 96,53%.

Isu strategis lain, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menggambarkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah, yang dihitung dari besarnya angkatan kerja berbanding jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada Tahun 2020 dari penduduk usia kerja sebanyak 600.850 orang, 428.178 orang diantaranya adalah angkatan kerja, dengan kata lain tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo sebesar 71,26 persen sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2019) yang berada pada angka 71.91 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 71,26 persen menunjukkan bahwa pada setiap 100 orang penduduk usia kerja terdapat 72 orang angkatan kerja yang siap bekerja menghasilkan barang dan jasa. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besarnya supply tenaga kerja. Hal ini bisa memberi nilai positif apabila tingkat diimbangi oleh tingkat permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, jika tidak diimbangi oleh tingkat permintaan tenaga kerja, maka berpotensi menimbulkan

pengangguran baru. Di sisi lain, pengangguran berpotensi akan terus bertambah, apabila tenaga kerja tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Apabila hal ini terjadi, maka permintaan tenaga kerja akan menurun.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo masih lebih rendah dibanding tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, namun tetap menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat bahwa negara mesti hadir memberi jawaban atas amanat konstitusi bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di samping kondisi riil menunjukkan bahwa pengangguran akan berkorelasi dengan tingkat kemiskinan dan tiadanya pekerjaan berdampak pada hilangnya kesempatan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tingkat pengangguran memberi tantangan pada upaya penyediaan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan, serta pertumbuhan berkeadilan melalui penciptaan wirausaha baru. Upaya penempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja melalui skema penempatan dalam negeri (Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah), maupun penempatan tenaga kerja luar negeri (Antar Kerja Antar Negara). Untuk itu, berbagai upaya lewat program dan kegiatan antara lain diarahkan pada upaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas penempatan kerja, serta memperluas kesempatan kerja bagi kelompok rentan. Upaya yang ditempuh meliputi: perbaikan tata kelola penempatan tenaga kerja, meningkatkan akses informasi pasar kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran, meningkatkan akses angkatan kerja terhadap sumberdaya produktif, dan mengembangkan ekonomi produktif berbasis masyarakat.

Di sisi lain, kemampuan dan daya saing tenaga kerja menjadi kunci penting dalam penempatan tenaga kerja. Kompetensi dan daya saing yang rendah memperkecil peluang penempatan tenaga kerja. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja juga mesti mendapatkan perhatian khusus. Sehingga isu strategis bidang ketenagakerjaan selanjutnya adalah peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional. Untuk itu berbagai kegiatan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang ditempuh melalui perbaikan tata kelola

lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi, perluasan kesempatan dan akses pelatihan kerja bagi masyarakat pencari kerja, peningkatan kualitas pelatihan kerja, peningkatan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja dalam penyiapan tenaga kerja siap pakai.

Sejalan dengan hal tersebut, tantangan dari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi isu yang tak lepas dari konteks kesiapan sektor ketenagakerjaan untuk memberi respon secara tepat, terukur, dan terarah. Tantangan MEA mengharuskan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mempersiapkan mental dan ketrampilan angkatan kerja sehingga mempunyai daya saing antara lain dengan standarisasi dan sertifikasi ketrampilan yang dipersyaratkan untuk bisa terlibat dalam kompetisi pasar tenaga kerja.

Sementara itu isu strategis dalam urusan perindustrian meliputi peningkatan daya saing industry, produktivitas sektor industri, pertumbuhan industri, dan daya serap industri terhadap tenaga kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Guna mendukung peningkatan daya saing industri, upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku industri, peningkatan kualitas kelembagaan IKM melalui jaringan kemitraan dan kerjasama, optimalisasi peran pengembangan dan inovasi serta pemanfaatan teknologi bagi IKM, mendorong pengembangan klaster industri prioritas, dan pengembangan industri potensial. Industri yang berdaya saing akan menjamin keberlangsungan dunia industri sekaligus mendukung tumbuhnya industri dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Urusan ketiga yang berada dalam kewenangan Dinas Tenaga Kerja, perindustrian dan Transmigrasi adalah urusan transmigrasi. Isu strategis pada urusan transmigrasi adalah pada upaya peningkatan kualitas penempatan transmigrasi, dengan strategi memperluas kerjasama penempatan dengan daerah tujuan penempatan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini mencakup pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dalam

tahun 2020 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2020.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Visi

Tahun 2020 adalah tahun keempat periode RPJMD 2016 – 2021. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tidak lain diarahkan pada upaya memberi kontribusi pada pencapaian visi Kabupaten Wonosobo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Kabupaten Wonosobo yaitu “Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera untuk Semua”, yang diterjemahkan ke dalam lima misi.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka seluruh program, kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tidak lain diarahkan pada upaya memberi kontribusi pada pencapaian visi tersebut. Kontribusi pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi di Kabupaten Wonosobo, setidaknya diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi **ketiga dan keempat**. Misi ketiga, yaitu “meningkatkan kemandirian daerah” yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari. Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

Sedangkan misi keempat yaitu “meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata” yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran yang hendak dicapai : (1) Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan, dengan strategi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya

meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja; dan (2) Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja.

Misi

Strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah: “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja” dan “Peningkatan Kualitas Produk Daerah”, yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Daerah dengan Tetap menjaga Kualitas Lingkungan”. Sasaran ini menjadi bagian dari tujuan “Meningkatkan Produktivitas, kemampuan Pengelolaan Sumberdaya dan Membangun Budaya Berdikari yang Optimal dengan Tetap Memperhatikan Lingkungan”., sebagai perwujudan dari misi ketiga RPJMD yaitu Meningkatkan Kemandirian Daerah”.

Hal tersebut sejalan dengan misi ketiga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, yaitu Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional. Juga selaras dengan misi kelima yaitu “Meningkatkan daya saing industri yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan” yang bertujuan untuk Meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, strategi RPJMD “Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan” yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” selaras dengan misi keempat yaitu Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta kesejahteraan pekerja yang bertujuan Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sejalan dengan strategi RPJMD: “Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “ terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan

lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”, misi kedua Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi yang bertujuan untuk mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta meningkatnya kesejahteraan pekerja.

Urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya produktif, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, serta kesejahteraan transmigran yang dilaksanakan melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Di samping itu, pembangunan ketenagakerjaan juga diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian misi ke-4 yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan setidaknya terdapat dua sasaran yang hendak dicapai, yaitu (1) terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan. Strategi yang relevan dengan bidang ketenagakerjaan untuk mencapai sasaran ini adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, yang diarahkan pada upaya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja. (2) Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Strategi yang diterapkan untuk mendukung capaian sasaran ini adalah dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja, yang diarahkan pada upaya meningkatkan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masyarakat miskin dan sumberdaya lokal, dan meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi masyarakat kelompok rentan.

Sejalan dengan upaya memberi kontribusi pada pencapaian visi Kabupaten Wonosobo yaitu “Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera untuk Semua”, serta mengemban pencapaian misi ketiga RPJMD yaitu meningkatkan kemandirian daerah yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari dan keempat RPJMD yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo merumuskan tiga misi pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi di Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut :

Guna mendukung pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, maka ditetapkan misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatkan kemandirian daerah; dan
3. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata

Tujuan

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada urusan tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi, yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan

visi pembangunan Kabupaten Wonosobo. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan :

Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien dan profesional dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sasaran :

- a. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*

2. Misi 2 : Meningkatkan kemandirian daerah

Tujuan :

Meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan sektor industry yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional
- b. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- c. Meningkatnya pertumbuhan industri.
- d. Meningkatnya produktivitas sektor industri

3. Misi 3 : Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata

Tujuan :

Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja serta meningkatnya kesejahteraan pekerja.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas penempatan tenaga kerja
- b. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
- c. Meningkatnya kualitas penempatan transmigrasi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2020 memuat tiga tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien dan professional dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan sektor industri yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan;
3. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja serta meningkatnya kesempatan pekerja;

Ketercapaian ketiga tujuan tersebut di atas, diukur dengan 6 indikator. Guna mendukung capaian indikator tujuan yang diukur dengan tujuan di atas, maka ditetapkan sepuluh program pendukung, yaitu:

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi;
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan. Gambaran keterkaitan tujuan, indikator tujuan, dan target Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	12%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,8%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	0,1%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	1. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,60%
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,60%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja	1
		2. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	70%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	1. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	87,60%
		2. Penilaian indeks kepuasan masyarakat	89%

Target kinerja dalam dokumen penetapan kinerja tersebut disusun dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan dalam waktu satu tahun target kinerja tersebut dapat tercapai dengan baik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan OPD dalam pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan melihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja pada tahun bersangkutan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 adalah dengan didasarkan pada:

Pertama, PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan mengukur pada upaya pencapaian hasil kerja atau *outcome*, tidak hanya pada penggunaan sumber dana tetapi juga pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Indikator kinerja *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Kedua, sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran

dengan menggunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

Skala	Kategori		
86 s/d 100	Baik	Sangat Baik	Sangat Berhasil
70 s/d 85	Sedang	atau Baik	Atau Berhasil
55 s/d 69	Kurang	Sedang	Cukup Berhasil
Kurang dari 55	Sangat Kurang	Kurang Baik	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2020 dilakukan terhadap dokumen penetapan kinerja, dan pengukuran secara mandiri (*self assesment*) atas enam sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional;
2. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah;
3. Meningkatnya produktivitas sektor industri;
4. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja;
5. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; dan
6. Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan.

Adapun hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	12%	16,86%	140,47%
Capaian rata-rata sasaran					140,47%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,8%	-5,68%	-149,48%
Capaian rata-rata sasaran					-149,48%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	0,1%	14,54%	145,4%
Capaian rata-rata sasaran					145,4%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,60%	94,63%	100,04%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,60%	71,26%	94,26%
Capaian rata-rata sasaran					97,15%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	1	1	100%
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	70%	77,07%	110,1%
Capaian rata-rata sasaran					105,05%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,60%	87,61%	100,01%
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	89%	78,69%	88,42%
Capaian rata-rata sasaran					94,22%
Capaian Kinerja Dinas					72,14%

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahun 2020 merupakan tahun dimana secara ekonomi sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Hampir seluruh sektor terdampak oleh pandemi Covid-19. Sehingga target pertumbuhan ekonomi secara nasional pun mengalami beberapa koreksi angka pertumbuhan. Dampak nyata adalah adanya pertumbuhan di angka minus.

Evaluasi dan analisis kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dilakukan dengan mengacu formulir pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan pengukuran secara mandiri (*self assessment*) diperoleh hasil 72,14% yaitu dalam kategori baik. Untuk capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Sasaran strategis 1** : Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari misi kedua Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, yaitu: meningkatkan kemandirian daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan sektor industri yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan terdiri dari 6 (enam) kegiatan. Namun adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, hanya ada 2 (dua) kegiatan yang dapat dijalankan, sedangkan 4 (empat) kegiatan tidak terlaksanakan.

- a. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pelatihan di UPTD BLK. Sasaran kegiatan ini adalah pengadaan peralatan untuk *workshop* dan peralatan penunjang kegiatan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa tersedianya peralatan untuk Workshop Pariwisata, Bismar TIK, dan administrasi penunjang pelatihan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah 0% atau tidak ada realisasi anggaran karena adanya *refocusing* anggaran.

b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja melalui Pelatihan Keterampilan Meubelair, Tata Boga, Komputer, dan Service HP. Hasil dari kegiatan ini adalah terlatihnya masyarakat/ pencari kerja yang terampil dan siap kerja.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 99.10% atau sebesar Rp215.202.500,- dari pagu anggaran Rp 217.155.500,-

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Kegiatan	Target/ orang	Capaian/ orang	Tempat	Persentase
Pelatihan Keterampilan Meubelair	20	20	Wonosobo	100%
Pelatihan Keterampilan Tata Boga	20	20	Wonosobo	100%
Pelatihan Keterampilan Komputer	20	20	Wonosobo	100%
Pelatihan Keterampilan Service HP	20	20	Wonosobo	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

c. Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Tenaga Kepelatihan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas instruktur dan tenaga kepelatihan di UPTD BLK. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya *workshop* metodologi pelatihan, telaksananya *workshop* pelayanan prima, tersedianya sistem informasi pelaporan pelatihan yang memadai, melakukan pertemuan dan kerjasama dengan dunia industri dan telaksannya *rebranding* dan pemasaran UPTD BLK.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 99,68% atau Rp 60.874.500,- dari pagu anggaran tersedia Rp 61.069.500,-

d. Revitalisasi BLK.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pelatihan dan operasional UPTD BLK melalui pembuatan DED pengembangan UPTD BLK. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya rencana pengembangan

UPTD BLK yang sesuai dengan standar untuk pelatihan berbasis kompetensi.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah 0% atau tidak ada realisasi anggaran karena adanya *refocusing* anggaran.

e. Skill Competition.

Kegiatan ini bertujuan untuk uji keterampilan bagi peserta ex pelatihan maupun masyarakat umum. Kegiatan ini berupa *skill competition* untuk 8 sub kejuruan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas kompetensi tenaga kerja.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah 0% atau tidak ada realisasi anggaran karena adanya *refocusing* anggaran.

f. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan administrasi digital bagi LPKS. Hasil dari kegiatan ini adalah terlatihnya LPKS yang terampil dan kompeten.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah 0% atau tidak ada realisasi anggaran karena adanya *refocusing* anggaran.

Pencapaian target pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, tidak hanya mengacu pada pelatihan berbasis kompetensi yang menekankan pada keterampilan teknis/ *skills* bagi peserta pelatihan saja, namun juga pelatihan berbasis kewirausahaan dengan penekanan pada keterampilan managerial. Hal ini dipandang perlu selain untuk menciptakan wirausahawan baru, juga memberikan alternatif pilihan untuk berwirausaha atau menjadi pekerja. Sedangkan pelatihan kerja berbasis kompetensi itu sendiri merupakan pelatihan kerja yang dirancang agar peserta bisa mencapai suatu jenis kompetensi tertentu, berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Peserta yang mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu atau kompeten terhadap suatu keahlian tertentu yang ditetapkan oleh SKKNI.

Pencapaian sasaran strategis ini, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional. Capaian tersebut dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\frac{\text{jumlah peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat}}{\text{jumlah peserta pelatihan}} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2020

No	Indikator	Jumlah Peserta
1.	Peserta pelatihan berbasis kompetensi	528
2.	Peserta pelatihan berbasis kewirausahaan	256
3.	Peserta yang mendapatkan sertifikat	89

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui jumlah peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat adalah sebanyak 89 dibagi peserta pelatihan sebanyak 528 orang dikalikan 100 persen sama dengan 16,86 persen.

2. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari misi kedua Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo, yaitu: meningkatkan kemandirian daerah yang bertujuan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri ini diukur dengan meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil menengah, yang dihitung dengan formulasi jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun n-1 dibagi jumlah IKM tahun n-1 dikali 100 persen. Secara matematis, formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{(\text{jumlah IKM tahun } n \text{ dikurangi jumlah IKM tahun } n - 1)}{\text{jumlah IKM tahun } n - 1} \times 100\%$$

Pada Tahun 2019, jumlah IKM tercatat sebanyak 19.031 IKM, sedangkan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 11.750 IKM atau mengalami penurunan jumlah IKM sebanyak 7.281 IKM, atau mengalami penurunan sebesar 38.26 persen. Hal ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang berimbas ke semua sektor usaha.

Capaian sasaran strategis ini masih di bawah target pertumbuhan IKM sebesar 3.8 persen, atau capaian kinerja pada sasaran strategis ini sebesar minus 38,26 persen.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Namun adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, hanya ada 3 (tiga) kegiatan di Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial yang dapat dijalankan, sedangkan 4 (empat) kegiatan lainnya tidak terlaksanakan.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan memberdayakan dan mengembangkan industri kecil dan menengah agar mampu berperan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terutama perluasan kesempatan kerja. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk, akses pasar, dan kemitraan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pelatihan pengolahan jagung dan emping mlinjo dengan sasaran IKM olahan hasil pertanian se-Kab Wonosobo. Hasil dari kegiatan tersebut meningkatnya keterampilan IKM pengolah hasil pertanian.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp 663.625,- dari pagu anggaran tersedia Rp 663.625,- di karenakan adanya *refocusing* anggaran.

- b. Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang IKM. Sasaran kegiatan ini adalah pendataan IKM di Kabupaten Wonosobo. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya database IKM dan aplikasi data IKM Kabupaten Wonosobo.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah 0% atau tidak ada realisasi anggaran karena adanya *refocusing* anggaran.

- c. **Fasilitasi Kerja Sama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta.**

Kegiatan ini berupa kegiatan bertemunya para pengusaha industri baik mikro, kecil, dan menengah dengan sasaran kegiatan adalah industri kecil yang berada di Wonosobo. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah kerjasama kemitraan dengan swasta.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp 1.302,500,- dari pagu anggaran tersedia Rp 1.302.500,- karena adanya *refocusing* anggaran.

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Tujuan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial adalah untuk mengembangkan sentra-sentra industri yang memiliki potensi untuk dapat berkembang bahkan maju sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Batik.**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mendesain, *finishing*, dan pewarnaan alami batik. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu meningkatnya daya saing industri kecil batik.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp 631.825,- dari pagu anggaran tersedia Rp 631.825,- karena adanya *refocusing* anggaran.

- b. **Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan Pengembangan Desain dan Fasilitas Sertifikat Produk.**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi uji nutrisi bagi 37 produk IKM dengan sasaran IKM se-Kabupaten Wonosobo.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 98,64% atau Rp73.980.325,- dari pagu anggaran tersedia Rp 75.000.000,-

- c. **Fasilitasi Berdiri dan Berkembangnya Sentra menjadi Klaster Industri.**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengolahan kopi dan pengukuhan sentra kopi dengan sasaran IKM Kopi Desa Slukatan dan Desa Tambi. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas industri pengolahan kopi.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp50.000.000,- dari pagu anggaran tersedia Rp 50.000.000,-.

d. Peningkatan Nilai Tambah Produksi melalui Diversifikasi dan Intensifikasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pelatihan makanan olahan singkong dengan sasaran IKM Desa Tempuran Nduwur dan Desa Tanjung Anom. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan pengolahan singkong bagi IKM.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 95,50% atau Rp95.500.000,- dari pagu anggaran tersedia Rp 100.000.000,-.

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatkan produktivitas sektor industri.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari misi kedua Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo, yaitu meningkatkan kemandirian daerah yang bertujuan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Kontribusi sektor industri ini diukur dengan meningkatnya pertumbuhan produktivitas sektor industri, yang dihitung dari produktivitas sektor industri pada tahun n dikurangi dengan produktivitas sektor industri pada tahun n-1. Sedangkan produktivitas sektor dihitung dengan formula PDRB sektor industri dibagi penduduk yang bekerja. Dengan demikian, pertumbuhan produktivitas sektor industri dirumuskan dengan:

“(PDRB sektor industri dibagi Penduduk yang bekerja pada sektor industri) pada tahun n dikurangi (PDRB sector industry dibagi Penduduk yang bekerja pada sektor industri) pada tahun n-1”

Produktivitas sektor ini diharapkan terus mengalami pertumbuhan, setidaknya tumbuh 0.1 persen setiap tahun. Untuk menghitung pertumbuhan produktivitas sektor industri pada Tahun 2020, harus diketahui produktivitas sektor pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, dengan variabel berupa PDRB sektor dan penduduk yang bekerja pada sektor industri.

Tabel 3.5
Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri
Tahun 2019 – 2020

Tahun	PDRB Sektor (dalam juta)	PYB sektor	Produktivitas	Pertumbuhan
2019	2330429.70	58 707	39.695.942,56	14.54%
2020	2333904.87	51 329	45.469.517,62	

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi terdiri dari 2 (dua) kegiatan, sedangkan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada Tahun 2020 tidak ada. Namun adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, keseluruhan program dan kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi industri kecil dan menengah. Untuk mendukung program tersebut, dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan:

a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi industri.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi informasi dan kemitraan. Hasil kegiatan tersebut adalah meningkatnya pengetahuan desain kemasan dan kemitraan usaha.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp571.905,- dari pagu anggaran tersedia Rp 571.905,- karena adanya *refocusing* anggaran.

b. Pengembangan TTG.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna. Hasil dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp 853.800,- dari pagu anggaran tersedia Rp 853.800,- karena adanya *refocusing* anggaran.

4. Sasaran strategis 4 : Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari misi keempat Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Keberhasilan dari sasaran strategis keempat ini diukur melalui 2 indikator kinerja, yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) diformulasikan:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diformulasikan:

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas, dapat diketahui tercapainya sasaran strategis berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Perhitungannya tertera pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Perhitungan Indikator Sasaran Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja

No.	Indikator Sasaran	Perhitungan Indikator Sasaran
1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	$\frac{405\ 187}{428\ 178} \times 100\% = 94.63\%$
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{428\ 178}{600\ 850} \times 100\% = 71.26\%$

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Pada Tabel 3.6 di atas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2020 adalah sebesar 71,26% dimana terdapat 72 orang dari 100 orang yang berpartisipasi dalam semua jenis pekerjaan. Artinya, banyak masyarakat di Kabupaten Wonosobo ikut andil untuk menggerakkan perekonomian sehingga secara tidak langsung mempengaruhi PDRB. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada Tahun 2020 sebesar 94,63%.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan. Namun adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, ada 2 (dua) kegiatan yang tidak terlaksana.

Melalui program ini diharapkan dapat membuka, menciptakan dan meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, serta meningkatkan perlindungan bagi

tenaga kerja (upaya preventif) melalui kegiatan pengembangan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan informasi pasar kerja dan pembinaan pengembangan BKK, LPK dan P3MI. Selain itu, melalui pengembangan pasar kerja diharapkan juga memudahkan para pencari kerja untuk mendapatkan informasi peluang lapangan kerja sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

a. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai.

Kegiatan ini berupa pelatihan *soft skill*. Dengan terlaksananya pelatihan tersebut diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah 0% atau tidak ada realisasi anggaran karena adanya *refocusing* anggaran.

b. Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

Kegiatan ini berupa pelatihan komputer di Desa Ngadisalam, pelatihan menjahit di Desa Gembengan, pelatihan pengolahan hasil pertanian di Desa Tegalgot. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan bagi calon wirausaha baru.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp73.600.000,- dari pagu anggaran tersedia Rp 99.604.000,-.

c. Pengembangan Kompetensi Wirausaha Melalui Inkubasi Bisnis.

Kegiatan ini berupa pelatihan TIK melalui inkubasi bisnis pembinaan pengembangan rintisan usaha bagi tenant domain. Hasil kegiatan ini adalah terbentuknya wirausaha baru di bidang TIK.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp 6.373.177,- dari pagu anggaran tersedia Rp 6.373.177,- karena adanya *refocusing* anggaran.

d. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja.

Kegiatan ini berupa penyuluhan informasi pasar kerja dan pemasaran tenaga kerja. Diharapkan melalui kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman tentang peluang kerja dan prosedur penempatan tenaga kerja serta meningkatkan jumlah lowongan kerja yang tersedia.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 99,95% atau Rp45.443.000,- dari pagu anggaran tersedia Rp 45.464.500,-.

e. Pengembangan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Kegiatan ini berupa sosialisasi pencegahan *trafficking* serta pelaporan dan penyusunan buku informasi ketenagakerjaan. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya BKK sebagai mitra penempatan tenaga kerja, terbinanya P3MI sebagai sarana penempatan tenaga kerja, menurunnya kasus *trafficking* dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 99,93% atau Rp82.363.859,- dari pagu anggaran tersedia Rp 82.424.830,-

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kegiatan Pengembangan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	32 buah	67 buah	100%
2	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja	300 orang	377 orang	100%
3	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat layanan Penempatan tenaga kerja (AKAD, AKAN, AKL)	4.500 orang	1.740 orang	38,67%
4	Laporan Informasi Pasar Kerja	12 bulan	12 bulan	100%
5	Jumlah PPTKIS yang mengikuti pembinaan sistem penempatan dan perlindungan TKI	12 perusahaan	11 perusahaan	91.67%
6	Jumlah perusahaan yang tergabung dalam Forum Kemitraan HRD	24 perusahaan	47 perusahaan	100%
7	Jumlah Bursa Kerja Khusus yang aktif dalam pembinaan Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus	26 BKK	34 BKK	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Tabel 3.8

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Pencari Kerja	Jumlah Penempatan
1	Angkatan Kerja Lokal (AKL)	-
2	Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)	59
3	Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)	377
Total		436

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

- f. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill.

Kegiatan ini berupa pelatihan las di Desa Kalidesel Kecamatan Watumalang, pelatihan komputer di Desa Pasuruan Kecamatan Watumalang, pelatihan menjahit di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang dan pelatihan handycraft di UPTD Balai Latihan Kerja Wonosobo. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan warga miskin.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 87,49% atau Rp299.500.000,- dari pagu anggaran tersedia Rp 250.000.000,-

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill

Indikator Kegiatan	Target	Capaian	Persentase
Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan	100 orang	176 orang	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

5. **Sasaran strategis 5** : Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari misi keempat Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Salah satu isu strategis bidang ketenagakerjaan adalah masalah hubungan industri dan perlindungan hak-hak buruh/ pekerja. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang ketenagakerjaan, salah satunya ditujukan pada upaya penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan

memperbaiki iklim ketenagakerjaan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Keberhasilan dari sasaran strategis kedua ini diukur melalui 2 indikator kinerja, yaitu angka sengketa pengusaha – peserta dan persentase tenaga kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (Jamsostek, dll) dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 3.10
Formulasi Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja

No.	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator Sasaran
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja	Jumlah sengketa pengusaha-pekerja
2	Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (Jamsostek, dll)	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja peserta program perlindungan}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Berdasarkan formula di atas, dapat diketahui tercapainya sasaran strategis terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Perhitungannya tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Perhitungan Indikator Sasaran Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja

No.	Indikator Sasaran	Perhitungan Indikator Sasaran
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja	1
2	Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (Jamsostek dll)	$\frac{7\ 826}{10\ 154} \times 100\% = 77.07\%$

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Pada Tabel 3.11 di atas, angka sengketa pengusaha-pekerja pada Tahun 2020 adalah sebanyak 1 kasus dan telah terselesaikan secara bipartie. Sementara, persentase tenaga kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (Jamsostek, dll) sebesar 77,07 persen.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Namun adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, ada 2 (dua) kegiatan yang tidak terlaksana.

a. Fasilitas Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial.

Kegiatan ini berupa sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ kerja bagi pekerja dan pengusaha. Diharapkan dari kegiatan ini akan tercipta suasana ketenagakerjaan yang kondusif dan ketenangan berusaha serta terselesaikannya permasalahan hubungan industrial.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp 2.400.00,- dari pagu anggaran tersedia Rp 2.400.000,- karena adanya *refocusing* anggaran.

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase mediasi sengketa yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi mekanisme penyelesaian hubungan industrial	45 perusahaan	0	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

b. Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini berupa sosialisasi mengenai jaminan sosial dan pemahaman hubungan industrial kepada calon peserta Program AKAD, terselenggaranya kegiatan monitoring pelaksanaan BPJS Tenaga Kerja, dan sosialisasi tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja. Diharapkan, calon peserta AKAD dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang pekerja, BPJS Tenaga Kerja dapat dilaksanakan sesuai aturan, dan peserta sosialisasi memahami tentang jaminan sosial yang harus ada di sebuah perusahaan.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 100% atau Rp12.455.000,- dari pagu anggaran tersedia Rp 12.455.000,- karena adanya *refocusing* anggaran.

- c. Peningkatan Lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit, dan Serikat Pekerja.

Kegiatan ini berupa sidang Badan Pekerja LKS Tripartit, sidang LKS Tripartite, dan sidang pleno LKS Tripartite. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya kesamaan pandangan dalam masalah ketenagakerjaan bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah, meningkatkan koordinasi lembaga ketenagakerjaan, terselenggaranya peringatan Hari Buruh 2020, dan terwujudnya kelembagaan LKS Tripartite yang berkompeten.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 96,30% atau Rp48.150.000,- dari pagu anggaran tersedia Rp 50.000.000,-

- d. Fasilitas Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten

Kegiatan ini berupa pelaksanaan pemantauan UMK 2020, struktur skala upah, pelaksanaan sidang Depekab, sosialisasi UMK 2021, dan sosialisasi ketenagakerjaan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah perusahaan telah melaksanakan upah sesuai dengan UMK, terselesaikannya usulan UMK 2021, meningkatnya perusahaan yang memberikan upah sesuai UMK, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar 98,40% atau Rp49.200.000,- dari pagu anggaran tersedia Rp 50.000.000,-.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kegiatan Fasilitas Dewan Pengupahan Kabupaten

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah pemantauan pelaksanaan UMK pada perusahaan	50 perusahaan	16 perusahaan	32%
2	Terlaksananya Sidang Depekab	1 paket	1 paket	100%
3	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi penerapan UMK	50 perusahaan	120 perusahaan	100%
4	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi struktur skala upah	50 perusahaan	50 perusahaan	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari misi keempat Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung kegiatan kedinasan.

Sasaran strategis ini memiliki dua indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Evaluasi Sakip Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Metode yang digunakan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat adalah menggunakan sampel dan kuisioner dengan survey selama 6 bulan pada bulan Maret s/d Agustus 2020. Kuesioner diberikan kepada masyarakat yang datang ke Layanan Terpadu Satu Atap untuk mendapatkan pelayanan. Pada

Tahun 2020, skor Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar 87,6 persen dan dapat terealisasi sebesar 87,61 persen.

Sedangkan Nilai Evaluasi Sakip adalah nilai yang keluar menjadi salah satu tolak ukur capaian kinerja institusi berdasarkan apa yang telah dilakukan dengan capaian target yang telah dicanangkan sebelum program dilaksanakan. Target nilai evaluasi sakip Tahun 2020 sebesar 89 atau pada kategori baik atau sangat baik atau sangat berhasil.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2020 alokasi anggaran untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar Rp 6.451.845.977,00 yang secara garis besar terbagi dalam dua skema anggaran, yaitu anggaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung sebesar Rp 2.063.171.362,00 sedangkan belanja tidak langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp 4.388.674.615,00. Anggaran dan realisasi anggaran disajikan pada Tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel. 3.14
Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi Tahun 2020

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A.	BELANJA LANGSUNG		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.265.000,00	477.564.454,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220.325.000,00	210.503.034,00
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	278.836.200,00	278.068.200,00
4	Program Perluasan Kesempatan Kerja	733.866.507,00	731.417.036,00
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50.000.000,00	49.200.000,00
6	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1.425.705,00	1.425.705,00
7	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.966.125,00	1.966.125,00
8	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	225.631.825,00	223.912.150,00
9	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	64.855.000,00	63.005.000,00
10	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	-	-
B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1	Belanja Pegawai	4.388.674.615,00	3.944.086.104,00
2	Insentif Pajak/ Retribusi Daerah	-	-
3	Belanja Hibah	-	-
4	Belanja Bantuan	-	-
5	Belanja Tidak Tersangka	-	-
Jumlah total		6.451.845.977,00	5.981.147.808,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

Pada Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo hanya dapat menyumbang Rp 1.000.000,00 dari target Rp 5.000.000,00 untuk pendapatan asli daerah. Sedangkan serapan anggaran, sampai dengan akhir Tahun 2020, dari anggaran sebesar Rp 6.451.845.977,00 terserap sebesar Rp 5.981.147.808,00 atau sebesar 92,70%. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp 2.063.171.362,00 dapat terserap Rp2.037.061.704,00 atau sebesar 98,74%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam waktu satu tahun anggaran, yang didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja.

Mengacu pada enam sasaran strategis yang telah ditetapkan, didapatkan nilai capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sebesar 72,14% yang berarti capaian kinerjanya dalam kategori baik. Oleh karena itu, hal ini menjadi pelecut dan koreksi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk terus berusaha dapat melampaui target. Sementara pencapaian kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp 6.451.845.977,00 dapat terserap sebesar Rp5.981.147.808,00 atau sebesar 92,70%. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp 2.063.171.362,00 dapat terserap Rp2.037.061.704,00 atau sebesar 98,74%.

B. Rekomendasi:

Walaupun dalam capaian rata-rata kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa terdapat sasaran strategis yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya. Capaian kinerja pada sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ini sangat dipengaruhi keadaan ekonomi secara makro, iklim investasi juga kultur budaya masyarakat Wonosobo itu sendiri.

Dalam hal perencanaan, perlu dipertajam indikator capaian kinerja sehingga dengan indikator tersebut dapat menjadi kontrol atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Dalam hal pelaksanaan perlu ditingkatkan konsistensi dan komitmen untuk menjalankan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan.